

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Daerah Penyangga Senang

DKI Siap Gelontorkan Ratusan Miliar

JAKARTA - Pemprov DKI kembali menganggarkan untuk delapan daerah penyangga di tahun 2020 mendatang. Jumlahnya hingga mencapai Rp 618 miliar yang dialokasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020

Kota Bekasi meraih bantuan tertinggi ketimbang daerah lainnya. "Seluruh pembiayaan bantuan anggaran untuk daerah penyangga masuk ke dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020 mendatang," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, Minggu (29/9).

Premi menambahkan, bantuan anggaran ke daerah penyangga ini terkait penanggulangan kemacetan, banjir, sampah, ketahanan pangan, dan juga saat ini Pemprov DKI sedang menggalakkan transportasi massal. Menurut dia, seluruh program itu sebagai upaya dukungan daerah penyangga atas visi misi DKI.

Bantuan tahun 2020, untuk Kota dan Kabupaten Bekasi kata Premi, untuk pembangunan tempat parkir (park and ride) di sekitar stasiun kereta rel listrik (KRL). Karena nantinya, masyarakat akan melanjutkan perjalanannya ke Jakarta meng-

gunakan fasilitas kereta api.

Kemudian bantuan keuangan kepada Pemkot Depok, Pemkot Bogor, dan Pemkab Bogor kata Premi, untuk merevitalisasi situ dan membangun kolam retensi untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. "Tiga wilayah itu di fokuskan untuk membangun kolam retensi agar pencegahan banjir bisa dilakukan di wilayah hulu," katanya.

Kemudian, kata dia, Pemprov DKI juga bakal memberikan bantuan keuangan ke Pemkab Cianju. Bantuan itu untuk mendukung program kata jajan pangan yang ada di Jakarta. Nantinya, Pemkab Cianjur akan membangun irigasi dan gudang pemeriksa pangan.

Premi mengaku, seluruh program itu sudah diusulkan pemda penyangga dengan mengirimkan proposal bantuan keuangan kepada Pemprov DKI. Hanya saja, kata Premi banvak usulan yang tidak dikabulkan Pemprov DKI karena sejumlah pertimbangan yakni tidak sesuai dengan program RPJMD. "Jika usulan program itu mendukung program RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasti dibantu," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, seharusnya Pemprov DKI mampu menjelaskan kemampuan keuangannya setiap memberikan bantuan ke daerah penyangga. Sebab, meski keuangan DKI besar tetapi kata dia, kebutuhannya sangat banyak.

"Jangan dianggap DKI besar kemampuan keuangannya, tapi tidak butuh. Padahal masih banyak kebutuhan di Jakarta yang harus dibangun," tandas dia.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah menegaskan, bantuan DKI untuk sejumlah daerah penyangga itu harus bisa digunakan secara efektif. "Harus tepat sasaran. Prioritasnya untuk program yang bisa ikut mengatasi persoalan di Jakarta, seperti penanggulangan banjir," ujar dia.

Karena itu, Agus meminta kepada warga Jakarta maupun warga daerah penyangga agar ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut. "Jangan sampai uang ratusan miliar itu tidak bisa menunjang kebutuhan DKI dengan daerah penyangga," tandas dia. (dny/aen)

DANA HIBAH RP618 MILIAR

KABUPATEN
CIANJUR
RP15 MILIAR

KOTA BEKASI
RP406 MILIAR

KOTA TANGERANG
RP 35 MILIAR

KOTA DEPOK
RP53 MILIAR

KABUPATEN BEKASI
RP34 MILIAR

KABUPATEN
TANGERANG
RP20 MILIAR

KOTA BOGOR
RP44 MILIAR

KABUPATEN
BOGOR
RP11 MILIAR

ANGGA GUMELAR/INDOPOS